

# PEMIKIRAN PENDIDIKAN PLURALISME KH. ABDURRAHMAN WAHID

Sarno Hanipudin dan Afif Anasrulloh Alhaq

STAS Majenang

**Abstract:** Indonesia is a pluralistic, diverse country, language and even religion. Indonesia is a "vulnerable" country to conflict because of pluralism. The conflict is very likely that the understanding of pluralism has not been built strongly, the SARA issue ahead of national political contestation is expected to continue to grow rooted in line with the dynamics that occurred. This paper tries to show Gusdur's thoughts on pluralism, as a religious and political figure, Gusdur's thought is considered as a reference to deepen and strengthen the education of pluralism in Indonesia.

**Keywords:** Pluralism, Gusdur.

**Abstrak:** Indonesia adalah negara majemuk, beragam suku, bahasa bahkan agama. Indonesia merupakan negara yang "rawan" konflik karena kemajemukan tersebut. konflik-konflik yang terjadi sangat memungkinkan bahwa pemahaman pluralisme belum terbangun secara kuat. Isu SARA menjelang kontestasi politik nasional diduga akan terus tumbuh mengakar seiring dengan dinamika yang terjadi. Tulisan ini mencoba menampilkan pemikiran Gusdur terkait pluralism. Sebagai tokoh agama juga politik, pemikiran Gusdur dinilai dapat menjadi referensi usaha pendalaman dan penguatan pendidikan pluralisme di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pluralisme, Gusdur.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak pulau dan terdapat beraneka ragam suku, agama dan ras di dalamnya. Keberagaman suku dan wilayah yang terbagi atas pulau-pulau mengakibatkan perbedaan budaya, perbedaan bahasa dan perbedaan kebiasaan. Kondisi tersebut memunculkan fenomena yang unik, yaitu percampuran antar budaya yang kemudian melahirkan budaya yang berbeda (*asimilasi*). Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia dapat bersatu dengan berbagai perbedaan yang dimiliki

antar masyarakat. Di sisi lain keragaman masyarakat juga dapat menimbulkan berbagai konflik. Sifat *egosentris* yang tinggi dari suatu kelompok kemudian menimbulkan ketidakpedulian terhadap kelompok lain. Padahal keragaman (*plural*) merupakan suatu keniscayaan yang telah di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tercantum dalam Q.S Al-Hujurat ayat :13, yang berbunyi

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.* (Departemen Agama RI, 2004: 745).

Jika dicermati secara mendalam Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya tentang suatu kondisi masyarakat *heterogen* yang terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Perbedaan suku dan bangsa ditujukan untuk saling mengenal bukan untuk bermusuhan dan bersaing. Hal tersebut juga menjelaskan manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya harus berinteraksi dengan orang lain. Proses interaksi antar latar belakang yang berbeda kemudian memunculkan pengetahuan yang baru. Manusia diharuskan belajar dari setiap manusia yang lain.

Dalam era globalisasi, dengan kemajuan teknologi dan kemajuan internet proses interaksi dan pertukaran informasi antar manusia sangat mudah dilakukan. Interaksi ini tidak sebatas dilakukan dua orang saja, dan dapat dilakukan langsung ke banyak orang tanpa memedulikan jarak, tempat dan waktu. Tetapi ada dampak dari cepatnya informasi dan proses interaksi tersebut yaitu informasi yang diperoleh tanpa melalui sensor, penyaringan dan pemilahan. Kondisi demikian amat berbahaya bagi keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat yang hanya mengetahui tentang budayanya sendiri, ketika mendapat informasi tentang budaya tempat lain dapat menganggap hal tersebut salah dan kebudayaannya sendiri yang paling benar. Tanpa mengenal secara mendalam keseharian dan latar belakang suku bangsa tersebut, masyarakat awam sudah mengeluarkan penilaiannya sendiri.

Pendidikan sebagai sarana penyampaian informasi dari berbagai sumber kepada peserta didiknya mempunyai peran penting dalam memberikan pengertian tentang keberagaman yang ada di masyarakat. Proses pendidikan menjadi penting dalam rangka mengembangkan potensi, kekuatan spiritual keagamaan, dan pengendalian diri menjadikan manusia mampu mengetahui jati dirinya dan hidup sejahtera secara berdampingan dengan sesama. Seperti tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional:

*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual*

*keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara* (UU No. 20 Tahun 2003).

Salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah terbentuknya masyarakat madani. Masyarakat madani adalah bentuk ideal dari suatu masyarakat demokratis. Masyarakat tersebut dibentuk atas kesepakatan bersama dari para anggotanya. Masyarakat madani yang demokratis adalah masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Setiap anggotanya mempunyai hak dan kewajibannya sama untuk memajukan hidup bersama. Tujuan tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat *plural*. Perlu adanya kesadaran dari tiap individu tentang keragaman tersebut untuk memajukan kehidupan bersama (Tilaar, 2010: 7).

Untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut maka manusia harus bertransformasi menjadi *humanisme*. Humanisme berarti sikap terbuka terhadap prinsip-prinsip orang lain. Artinya, kita dituntut untuk peduli dan sensitif terhadap kesulitan orang lain serta mencurahkan kasih sayang yang melampaui garis primordial ataupun sekat-sekat sosial lainnya. Humanisme mencitrakan keberimbangan (*fairness*) dan cinta keadilan. Dari pemahaman tentang perbedaan prinsip tersebut kemudian melahirkan tenggang rasa dan sikap toleransi terhadap kondisi yang beragam (*pluralisme*). Peranan pendidikan dalam membangun kerukunan antar masyarakat yang memiliki perbedaan prinsip sangatlah penting. Di Indonesia konsep hidup bersama dengan agama lain dan menghormatinya sudah dicontohkan ketika KH. Abdurrahman Wahid semasa hidupnya (Hanafi, 2007: 212).

Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gusdur), merupakan salah seorang tokoh yang konsisten menyerukan pluralisme dan toleransi. Beliau merupakan tokoh yang memperjuangkan kenyataan sosial bahwa Indonesia itu beragam (Barton, 1999: xxii). Bagi Gusdur, Islam adalah agama kasih sayang dan toleran sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya Islam adalah keyakinan yang egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak mendukung perilaku tidak adil karena alasan kelas, suku, ras, gender atau pengelompokan-pengelompokan lain dalam masyarakat. Bagian dari keyakinan mendasar Gusdur adalah nilai-nilai yang mendasari demokrasi dan liberalisasi adalah nilai-nilai universal (Barton, 1999: xxx). Melalui pandangan universalisme Islam, Gusdur menyampaikan lima jaminan dasar terhadap masyarakat baik perorangan maupun kelompok yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu an-nafs*); (2)

keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifdzu ad-din*); (3) keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*); (4) keselamatan harta benda milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum (*hifdzu al-mal*); dan (5) keselamatan hak milik dan profesi (*hifdzu al-aqli*) (Wahid, 2007: 4-5).

Dapat dipahami bahwa nilai-nilai universalisme Islam ketika diterapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang toleran dan humanis. Kemudian dari humanis dan toleran ini akan menimbulkan pemahaman pluralisme. Pluralisme yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan menghormati kondisi plural yang ada di masyarakat Indonesia. Kondisi yang rentan terhadap konflik ketika tidak ada sikap saling menghormati antar perbedaan-perbedaan tersebut.

Namun dalam pelaksanaan di masyarakat memiliki beberapa problem yang menjadikan pluralisme susah untuk diterapkan dan diterima oleh banyak orang. Pluralisme dianggap paham *sinkretisme*, yaitu mencampuradukan semua ajaran agama dan semua agama apada taraf kebenaran yang sama. Padahal pluralisme yang dibawakan oleh Gusdur adalah pluralisme sosial, maka terdapat pesan agama yang hakekatnya sama yaitu tentang kemanusiaan (Lihat <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=879>).

Oleh sebab itu, pendidikan sebagai agen perubah kebudayaan (*cultural broker*) harus memasukan pendidikan pluralisme kedalam pembelajarannya. Pendidikan pluralisme sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kerukunan dan menumbuhkan paham inklusif pada anak bangsa. Dengan orientasi saling memahami dan menghormati dengan yang berbeda agama. Nilai-nilai universal Islam harus disampaikan kepada anak didik. Konsep kemanusiaan dalam agama harus disebarluaskan kepada generasi penerus bangsa.

Mencermati realitas diatas tentang kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam yang kemudian rentan terhadap konflik, maka pendidikan pluralisme sangat perlu diajarkan. Oleh karena itu kajian tentang pemikiran pendidikan pluralisme perspektif Gusdur menjadi lebih menarik.

## B. BIOGRAFI KH. ABDURRAHMAN WAHID

Greg Barton dalam bukunya menuliskan bahwa Gusdur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus. Gusdur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan. Gusdur dilahirkan di Denanyar, dekat Kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syansuri (Barton, 2002: 25-26). Pada bulan Sya'ban, bulan kedelapan dalam penanggalan Islam, tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1940 adalah

tanggal 7 September. Sebagaimana kebanyakan santri, Gusdur menggunakan nama ayahnya setelah namanya sendiri yaitu Abdurrahman 'putera' Wahid. Beliau lahir dengan nama Abdurahman Ad-Dakhil. Secara harfiah ad-Dakhil berarti "Sang Penakluk". Nama tersebut diambil dari salah seorang pahlawan dari Dinasti Umayyah yang berhasil membawa Islam ke Spanyol dan mendirikan peradaban yang berlangsung di sana selama berabad-abad (Barton, 2002: 35). Karena kata "Ad-Dakhil" kurang akrab di masyarakat, maka ganti dengan "Wahid". Gusdur merupakan anak pertama dari enam bersaudara dan lahir di tengah kalangan yang cukup disegani baik secara strata sosial maupun keagamaan yakni keluarga pendiri NU (Nahdlatul Ulama), K. H. Hasyim Asy'ari (Wahid, 2016: 313).

Ayahnya bernama Wahid Hasyim yang pernah menjadi menteri agama RI dan cucu Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari salah seorang pendiri NU sekaligus guru dari banyak ulama di Indonesia (Muhammad, 2015: 11). Pada tahun 1939 NU menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman Belanda, kemudian pada tanggal 2 Oktober 1943 beliau ditunjuk menjadi Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Pada tahun 1944 mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta dan menjadi salah satu anggota BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 (lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Wahid\\_Hasjim](https://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjim)).

Solichah adalah nama ibunda Gusdur yang lahir pada 11 oktober 1922 di sebuah desa bernama Denanyar. Ibunya, Noer Khodijah adalah keturunan ulama besar dari pesantren Tambakberas dan ayahnya adalah Kyai Bishri Syansuri yang merupakan keturunan ulama Lasem. Solichah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 Juli 1994 sekitar pukul 23.00 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah menjalani rawat inap selama 17 hari akibat sakit jantung dan gula. Jenazahnya kemudian dimakamkan keesokan harinya di kompleks pemakaman Tebuireng, Jombang (Lihat <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>).

Gusdur adalah salah seorang tokoh intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat disegani. Salah satu aspek yang paling bisa dipahami dari Gusdur adalah bahwa dia penyeru pluralisme dan toleransi, pembela kaum minoritas. Gusdur dipahami sebagai muslim *non-chauvinis*, sebagai figur yang memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial bahwa Indonesia itu beragama. Gusdur adalah orang yang bangga sebagai seorang muslim. Dia sangat mencintai

kebudayaan Islam tradisionalnya dan juga pesan utama Islam sendiri (Barton, 2002: xxii).

Sebagai anak dari Wahid Hasyim yang merupakan tokoh gerakan nasional Gusdur sering bertemu dengan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Mohammad Hatta. Wahid Hasyim memiliki lingkup persahabatan yang luas. Rumahnya selalu dipenuhi oleh tamu dari berbagai golongan termasuk orang-orang Eropa. Hal yang demikian menjadikan Gusdur mengenal berbagai budaya dan golongan orang yang bukan pribumi (Barton, 2002: 41).

Sebagaimana seorang remaja lainnya, Gusdur seorang yang gemar menonton film di bioskop. Apresiasi Gusdur terhadap film jauh lebih serius daripada yang ditunjukkan oleh teman-teman sebayanya. Beliau juga tertarik dengan wayang kulit, yang sering dipentaskan di wilayah Yogyakarta. Gusdur juga menyukai cerita-cerita mengenai pendekar silat Cina yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia keturunan cina ataupun terjemahan dari tulisan-tulisan asli dalam bahasa Cina. Pada saat remaja, Gusdur juga tertarik pada kisah-kisah yang berkaitan dengan Perang Dunia II. Sebagian kisah ini dibacanya sebagai cerita bersambung di surat kabar-surat kabar setempat yang merupakan sindikasi dari surat kabar Barat (Barton, 2002: 54-55).

Pada tahun 1960 Gusdur melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebagai seorang siswa pesantren yang terbiasa melakukan ziarah ke makam-makam, Gusdur mempunyai hubungan yang erat dengan tempat-tempat bersejarah dan secara naluri percaya bahwa mereka yang pernah hidup di sana akan tetap berada di tempat itu. Ketika berada di Kairo, Gusdur berusia dua puluh lima tahun mendapati bahwa ia dapat menonton film-film Eropa, Inggris dan Amerika. Akan tetapi Gusdur lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan Universitas Amerika di Kairo (Barton, 2002: 89).

Pada tahun 1972 beliau mulai memberikan ceramah dan seminar secara teratur dengan berkeliling Jawa. Ia juga menulis untuk majalah berita nasional seperti *Tempo* dan juga artikel di *Kompas*. Kolom-kolom tulisan Gusdur di *Tempo* dan *Kompas* mendapat sambutan baik dan dengan cepat ia dianggap sebagai pengamat sosial yang sedang naik daun (Greg Barton, 2002: 119). Tahun 1977 Gusdur didekati dan ditawarkan jabatan sebagai Dekan Fakultas Ushuludin di Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Dengan gembira ia menerima tawaran tersebut kemudian mulai memberikan kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuludin (Barton, 2002: 123).

Gusdur menjadi anggota Dewan Syariah selama beberapa tahun bersama dengan kakeknya. Kyai Bisri Syansuri menjadi ketuanya (Rais Aam).

Pengalaman ini membuatnya melihat dengan lebih jelas cakupan dan sifat masalah-masalah yang dihadapi oleh NU dan juga memperkokoh reputasinya sebagai pemimpin muda yang penuh harapan. Pada awal tahun 1981 Gusdur diundang untuk bergabung dengan kelompok yang menyusun Repelita (Rancangan Pembangunan Lima Tahun) pemerintah. Kelompoknya ditugasi untuk mengembangkan rincian mengenai koperasi. Tahun berikutnya, Gusdur yang sudah cukup dikenal dikalangan intelektual liberal, penulis, dan artis di Jakarta, dan dihormati karena tulisan-tulisan dan juga pengetahuannya mengenai film dan sastra diminta untuk menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (Barton, 2002: 131).

Menjelang 1982, Gusdur menjalin hubungan dan kerjasama yang erat dengan Kyai Ahmad Shidiq yang usianya dua puluh empat tahun lebih tua dari Gusdur. Setelah melakukan diskusi panjang dengan Kyai Ahmad Shidiq dan beberapa Kyai lainnya akhirnya terbentuk forum yang terdiri dari 24 tokoh muda NU yang berpikir cemerlang dimana tujuh orang di antaranya (termasuk Gusdur dan Kyai Ahmad Shidik) memiliki tugas memetakan rencana pembaharuan NU. Pada tahun 1984 Gusdur dan Kyai Ahmad Shidik berhasil menjadi pimpinan NU dan disambut baik oleh semua kalangan (Ibad, 2010: 37-39).

### C. KONSEN PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID

Secara tipologi pemikiran Gusdur dapat dikategorikan sebagai tokoh Islam yang bertipologi neo-tradisionalisme. Tipologi ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai tradisi yang berkembang di masyarakat (lokal) bisa menjadi potensi positif bagi lahirnya tradisi intelektualisme, etos kerja, dan penopang pembangunan bangsa. Bahkan pada batas-batas tertentu, unsur-unsur dalam tradisi lokal bisa mendukung terciptanya demokratisasi di masyarakat yang – baik secara langsung maupun tidak langsung- mampu menciptakan suasana masyarakat modern tanpa harus kehilangan akar budayanya (Akaf, 2011: 148).

Konsep dasar dari pemikiran Gusdur yakni humanisme Islam. Prinsip humanisme Islam ini memang terkait dengan kultur Gusdur itu sendiri yakni, Nahdlatul Ulama (NU). Di dalam kultur ini terdapat ikatan kuat antara Islam dan kebangsaan yang awlanya digagas oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mas Mansur melalui Nahdlatul Wathan. Gusdur mengikuti tradisi ini yakni kebangsaan perspektif Islam. Inilah yang kemudian menjadi kultur Indonesia. Kultur yang merujuk kepada penghargaan atas multikulturalisme atau pluralisme (*ta'adudiyah*). Jadi pluralitas sudah *inheren* di Indonesia yang tidak terjadi di

Arab, sebab negri ini memusat satu bangsa, satu suku dan agama sehingga mereka tidak mempunyai pengalaman *ta'adudiyah* di kehidupan sehari-hari (Arif, 2013: 12).

Gusdur dalam kerangka praktisnya mengambil paradigma substantif dalam mempositifkan hukum Islam. Artinya, akomodasi hukum Islam kedalam hukum nasional berkisar pada prinsip dan nilai-nilai universal Islam. Gusdur yang telah terbiasa dengan logika-logika fiqh yang serba positifistik menyarankan agar logika *al-qawa'id al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh) dan kaidah-kaidah ushul fiqh dijadikan metode dalam pengambilan hukum. Ini dilakukan mengingat perkembangan zaman dari waktu ke waktu yang mengalami perubahan. Disini pula, Gusdur ingin mengatakan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang statis, dan ajaran Islam bukan sesuatu yang sekali jadi sehingga membutuhkan reformulasi maupun reaplikasi (Wahid, 2007: xviii-xix).

Dalam soal Islam dan kaitannya dengan masalah sosial budaya Gusdur melancir sebuah gagasan yaitu "pribumisasi Islam" sebagai upaya rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat agar budaya lokal tidak hilang. Pribumisasi bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Pribumisasi juga bukan "jawanisasi" atau sinkretisme, sebab pribumisasi hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukan meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada *ushul fiqh* dan *qaidah fiqh*, Jadi mengakomodir kebudayaan lokal yang bersesuaian dengan ajaran agama Islam (Wahid, 2006: xxx).

Integrasi nasional juga menjadi pemikiran Gusdur lainnya. Dalam kontes ini Gusdur menginginkan agar (gerakan) Islam menempatkan dirinya sebagai bagian dari gerakan nasional dan para intelektual muslim tidak mendudukan dirinya secara eksklusif, baik dalam pengertian kelembagaan maupun pandangan politik-keagamaan. Gusdur melihat terjadinya kesalahpahaman sangat besar antara pengelola ideologi negara dan pimpinan gerakan-gerakan keagamaan telah menghambat proses membangun. Bahkan proses pembangunan membawa titik tengkar baru antara pimpinan keagamaan dan pengelola ideologi negara. Untuk itu solusi terhadap konflik ini adalah suatu dialog intensif dan persuasif di mana di satu sisi aspirasi keagamaan dan non-keagamaan terus menyarankan kerja aktual dalam skala mikro dan disisi lain pihak negara bersedia melindungi

dan membantu program-program mikro ditingkat bawah tersebut dengan konsekuensi mengubah besar-besaran politik pembangunannya (Wahid, 1999: xxv).

Banyak hal yang menjadi kajian-kajian Gusdur didalam tulisannya yang dimulai tahun 80-an sampai beliau wafat. Pemikiran mengenai nasionalisme, hak asasi manusia, kebudayaan, gerakan Islam radikal dan pluralisme. Dari berbagai bidang tersebut dibuat suatu kesimpulan utama tentang pemikiran Gusdur. Kemudian pemikiran-pemikiran beliau dirumuskan menjadi "9 Nilai Utama Gusdur" merupakan prinsip-prinsip dasar yang telah Gusdur ajarkan meliputi ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, persaudaraan, kesederhanaan, kesatria, dan kearifan lokal (dalam <http://www.gusdurian>).

#### 1. Ketauhidan

Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya Dzat hakiki Yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekadar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingsingkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagad raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gusdur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Orientasi paham keislaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya. Seperti kata "*masalah 'ammah*" yang berarti kesejahteraan umum. Inilah yang seharusnya menjadi objek segala macam tindakan yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum dan/ atau kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat Islam. Hal yang langsung tampak dalam adagium *fiqh*: "tindakan/kebijakan seorang pemimpin atas rakyat (yang dipimpin) sepenuhnya bergantung pada kebutuhan/kesejahteraan mereka (*tasharruf al-imam 'ala al-ar'iyah manuthun bi al-mashlahah*)" (Wahid, 2006: 21-22). Bisa diartikan pula segala tindakan kita adalah didasarkan karena kecintaan dan kepercayaan kita terhadap Allah SWT.

#### 2. Kemanusiaan

Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan

memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan Penciptanya, demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah, Gusdur membela kemanusiaan tanpa syarat.

Pembelaan terhadap nilai kemanusiaan dilandasi dari Universalisme Islam yang menampakan diri dalam berbagai manifestasi ajaran-ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai bidang seperti hukum agama (*fiqh*), keimanan (*tauhid*), serta etika (*akhlak*) sering disempitkan oleh masyarakat hingga hanya kesusilaan belaka dan dalam sikap hidup. Unsur-unsur itulah yang sesungguhnya menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (Wahid, 2007: 3).

### 3. Keadilan

Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggungjawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gusdur rela dan mengambil tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

### 4. Kesetaraan

Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gusdur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marginal.

### 5. Pembebasan

Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Melalui nilai pembebasan ini, Gusdur selalu mendorong dan memfasilitasi

tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain.

#### 6. Kesederhanaan

Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan *patut*. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan Gusdur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran dan keteladanan.

#### 7. Persaudaraan

Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gusdur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran.

#### 8. Kesatria

Kesatria bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi: penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi, serta istiqomah. Kesatria yang dimiliki Gusdur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya.

#### 9. Kearifan Lokal

Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia di antaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan nusantara yang beradab. Gusdur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban.

Sebuah nilai Islam (*Islamic value*) tepat untuk dipakai bagi para peranakan pemuka adat yaitu; "Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa

kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan". Hal ini berarti pemuka adat dapat menjadi pemimpin kerana ungkapan lain yang menyatakan: "Hukum adat dapat saja digunakan sebagai pedoman agama (*Al 'adatu muhakkamah*)", yang menunjukkan pertalian antara hukum adat dan Islam hingga benar adanya bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan adat (Wahid, 2006: 276).

#### D. PLURALISME DALAM PANDANGAN KH. ABDURRAHMAN WAHID

KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) merupakan tokoh Indonesia yang memiliki banyak peran dalam kehidupan bangsa dan negara. Mulai dari berperan sebagai pimpinan organisasi terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama, menjadi cendekiawan muda yang menuangkan gagasannya dalam tulisan yang dimulai tahun 70-an, menjadi "penyeimbang" kekuasaan di era pemerintahan orde baru dan juga menjadi Presiden Indonesia keempat ketika masa transisi reformasi. Peran yang tidak kalah penting adalah menjadi pelopor pluralisme. Tentunya pemahaman pluralisme Gusdur tidak lepas dari perjalanan hidup dan lingkungan sekitarnya yaitu:

1. Pluralisme yang digagas oleh Gusdur adalah berangkat dari ajaran Islam, hal ini bisa terjadi karena latar belakang keluarga berasal dari pondok pesantren yang memegang teguh ajaran-ajaran ulama klasik terdahulu.
2. Pemikiran Gusdur yang inklusif terbentuk ketika bersama ayahnya sering bertemu dengan tokoh yang memiliki latar belakang berbeda-beda.
3. Ketertarikan beliau dalam membaca bukan hanya pada yang berkaitan dengan Islam melainkan buku-buku lain seperti tulisan-tulisan Aristoteles dan Plato. *Das Kapital* karya Marx dan *What is To be Done* karya Lenin juga merupakan buku yang pernah dibaca beliau.
4. Pengalaman belajar di Timur Tengah dan perjalanannya di Eropa menjadikan Abdurrahman Wahid mengetahui berbagai kondisi masyarakat melalui interaksi dan diskusi (Barton, 2002: 56).

Dalam beberapa tahun terakhir Gusdur menjadi semakin kontroversial, ketika dia berusaha melerai pihak-pihak yang terlibat kekerasan, juga ketika dia berusaha menyebrangi badai dan gelombang besar pada akhir era Suharto dan era Indonesia pasca Suharto. Kendati demikian Gusdur tetap dan bahkan semakin populer sebagai figur karismatik dan tokoh yang selalu memberi cinta bahkan pada orang yang mengkritiknya atau para penentangannya. Tetapi mengapa Gusdur sering salah dimengerti? Tentu banyak alasan termasuk tempramen dan

kepribadiannya yang khas. Banyak kebingungan tentang Gusdur sebagian berasal dari peran banyak wajah yang dimainkannya dalam masyarakat Indonesia. Lebih tepat lagi, kebingungan itu berasal dari fakta bahwa pada satu sisi Gusdur pandang dan dikenal sebagai figur religius dan pada sisi lain ditafsirkan oleh banyak orang khususnya di pusat-pusat metropolitan dan antara kelas menengah terdidik Indonesia sebagai politisi yang sekuler atau sebagai intelektual liberal (Barton, 1999: xx-xxi).

Begitu pula dengan pluralisme yang diajarkan Gusdur yang menjadi kontroversi. Pluralisme dianggap paham yang mencampuradukan berbagai pemahaman agama, dan kebenaran agama adalah relatif. Kemudian pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang haramnya paham pluralisme bersama dengan paham sekulerisme dan juga liberalisme agama. Dalam fatwa tersebut berbunyi:

*Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme agama mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga (Lihat <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/12/Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekulerisme-Agama.pdf>).*

Gusdur berpendapat “kesempurnaan sistem” Islam sebagai agama tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang lembaga tertentu melainkan pada kemampuan akal manusia untuk melakukan perbandingan-perbandingan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tuhan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk membawa persaudaraan di antara sesama manusia. Pengertian tersebut didasarkan pada firman Allah pada Q.S Ali Imran ayat 85:

*Barangsiapa mengambil agama selain Islam sebagai agama, tiada diterima (amal)-nya, dan Dia di akhirat “kelak” sebagai orang-orang yang rugi.*

Pernyataan ini menunjukkan hak tiap orang untuk merasa benar walaupun Islam meyakini kebenarannya sendiri. Dalam hal ini agama masih memiliki dimensi eksklusif tetapi keeksklusifan tersebut berlaku bagi penganutnya masing-masing (Wahid, 2006: 14).

Pluralisme yang dicontohkan oleh Gusdur adalah wujud implementasi dari ajaran Islam *rahmatan lil ‘alamin*. Pikiran-pikiran majemuk, pluralisme dari Gusdur selalu menjadi ingatan dan menjadi contoh keteladanan bagaimana membangun bangsa Indonesia. Karena itu yang dipikirkan dan dijalankan oleh Gusdur adalah mengimplementasikan pikiran-pikiran yang melekatkan bangsa ini. Gusdur adalah tokoh yang mengamalkan Islam bukan pada formalitas tetapi

lebih kepada substansi dari ajaran Islam tersebut. Dari pengamalan tersebut kemudian menurut penulis ada dua tulisan dari Gusdur yang dapat dijadikan landasan pluralisme beliau, yaitu tulisan tentang Universalisme Islam dan Pribumisasi Islam. Adapun dari tulisan tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan pembelaan hak asasi manusia, hubungan Islam dan negara.

#### 1. Universalisme Islam

Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki ajaran yang begitu luas dan memasuki semua bidang. Bukan hanya tentang ketauhidan tetapi juga tentang menjalani kehidupan di dunia dan juga akhirat. Sebagai manusia yang ditugasi Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Islam Nabi Muhammad SAW merupakan *rahmatan lil 'alamin*, yang berarti ajaran Nabi Muhammad bukan hanya untuk umat Islam melainkan untuk semua makhluk yang ada di dunia. Universalisme Islam menampakan diri dalam berbagai manifestasi ajaran-ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi bidang seperti hukum agama (*fiqh*), keimanan (*tauhid*), serta etika (*akhlaq*) seringkali disempitkan oleh masyarakat hingga menjadi kesusilaan belaka dan dalam sikap hidup. Padahal unsur-unsur itulah yang sesungguhnya menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (*al-insaniyyah*) (Lihat <http://m.detik.com/news/berita/3104715/jk-gus-dur-adalah-panutan-pluralisme>).

Esensi agama Islam merupakan basis bagi sifat universal yang dimilikinya dan ini merupakan basis dari etika global Islam. Istilah yang paling tepat untuk Islam adalah etika, kemanusiaan dan ilmu sosial atau ideologi. Artinya Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw mengajarkan tentang hubungan dengan masyarakat dan juga penghargaannya terhadap orang lain. Kebutuhan primer dalam bermasyarakat dan komitmen untuk menjada moral serta aksi sosial untuk membantu sesama (Hanafi, 2007: 4).

Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok, yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu an-nafs*); (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*hifdzu ad-din*); (3) keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu an-nasl*); (4) keselamatan harta benda milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum (*hifdzu al-mal*); dan (5) keselamatan hak milik dan

profesi (*hifdzu al-aqli*) (Wahid, 2007: 4).

Jaminan keselamatan fisik warga masyarakat dapat terwujud manakala masyarakat dan pemerintah mampu memahami tentang persamaan hak. Bahwa setiap warga negara dan juga setiap manusia memiliki hak yang sama, yaitu hak merasa aman dan dilindungi. Pemerintah juga harus memainkan peran untuk melindungi warga negaranya. Hal ini juga sesuai dengan Pancasila sila ke dua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan keberadaban manusia tentunya dinilai dari perilakunya, bukan hanya kepada sesama tetapi juga kepada lingkungan dimana ia tinggal. Implementasi dari penjaminan keselamatan fisik kemudian menimbulkan sikap toleransi. Yang kemudian ketika toleransi ini kita berlakukan kepada umat non-muslim, suku yang berbeda dan bangsa yang berlainan menimbulkan pemahaman tentang pluralisme. Toleransi kita diminta oleh kitab suci yang kita yakini, bahwa Islam adalah pelindung bukan hanya manusia tetapi semua makhluk yang ada di dunia (Wahid, 2006: 78).

Sama halnya dengan jaminan keselamatan keyakinan beragama bagi masyarakat. Dalam ajaran agama Islam sudah diberikan tentang landasan menghargai dan menghormati umat beragama lain. Sudah banyak konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminatif, satu-satunya pembenaran bagi tindakan kekerasan secara individual adalah jika kaum muslimin diusir dari rumahnya (*idaza ukhriju min diyarihin*) (Wahid, 2006: 300).

Kekerasan yang digembor-gemborkan berdasarkan sentimen agama tentunya akan menghasilkan kerusakan. Bukan hanya kerusakan lingkungan yang terjadi karena kerusakan fisik tetapi juga sampai kepada rusaknya mental anak-anak kecil yang ditimbulkan karena trauma. Hilangnya rasa nyaman untuk menjalankan keyakinan agamanya juga akan berimbas kepada sistem pemerintahan negara karena agama minoritas akan menjadi "warga kelas dua". Sejarah umat manusia membuktikan bahwa toleransi adalah bagian *inherent* dari kehidupan manusia (Wahid, 2007: 5).

Jaminan terhadap keselamatan harta milik pribadi merupakan cara untuk masyarakat mampu menampilkan kreativitasnya. Dari kreativitas individu mengelola hartanya secara mandiri kemudian dapat memunculkan kemandirian umat Islam. Memunculkan tentang Islam bukan hanya tentang ajaran-ajaran pengabdian kepada Tuhannya melalui ritual agama saja, tetapi Islam juga mengajarkan tentang kemandirian umat yang menjadi sarana untuk dapat beribadah dan mengabdikan kepada Tuhannya.

Jaminan dasar terhadap profesi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memilih pekerjaannya yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak ada paksaan untuk melakukan profesi tertentu, karena profesi itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari sinilah dapat dilihat universalisme Islam, bahwa profesi yang kita ambil haruslah dapat bermanfaat atau demi kemaslahatan umat manusia.

Kelima jaminan dasar itu yang menjadi dasar konseptual atas nilai universalisme Islam. Jika kelima dasar yang telah dikemukakan dapat diadopsi dan dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat maka tidak mustahil persatuan Indonesia yang di dalamnya tanpa ada kekerasan akan terwujud. Sifat kemanusiaan yang mencerminkan keberadabannya juga akan menjadi implemmentasi dari universalisme Islam. Dan hasil akhir dari universalisme Islam akan menimbulkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Cita-cita seperti inilah yang diinginkan oleh Gusdur melalui pluralisme yang dicontohkan semasa hidupnya. Dasar ajaran dalam Islam menjadi penggerak setiap kebijakan dan setiap tindakan yang dilakukan masyarakat.

## E. PROBLEMATIKA PLURALISME

### 1. Pendangkalan Pemahaman

Pluralisme yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan persatuan oleh sebagian orang dipandang sebagai upaya mencampuradukan ajaran agama atau sinkretisme. Pluralisme dinilai menghilangkan sisi eksklusifitas ajaran agama dengan memandang semua agama adalah benar. Hal yang lebih mengerikan pluralisme dipandang upaya untuk menghancurkan umat. Tentunya kesemuaan anggapan di atas adalah dikarenakan pemahaman yang "dangkal".

Gusdur beberapa waktu pernah dikritik karena kedekatannya dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bukankah sitab suci al-quran menyatakan salah satu tanda muslim yang baik adalah "bersikap keras terhadap orang kafir dan bersifat lembut terhadap sesama muslim (*asyidda 'u 'ala alkuffar ruhama baynahum*)" (QS al-Fath: 29). Tetapi Gusdur menanggapi yang dimaksud *kafir* atau *kuffar* adalah orang-orang musyrik (*polytheis*) yang ada di Mekah waktu itu (Wahid, 2006: 299).

Pendangkalan agama ini ditengarai sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang literalis-skriptualistik yang sering terjebak dalam ruang ideologi yang bersifat subyektif, normatif, dan tertutup. Dalam wilayah sosial

sering dicirikan dengan anggapan bahwa komunitasnya atau selain jama'ahnya adalah sesat dan mungkar. Oleh karena itu, harus didefinisikan sebagai musuh bagi komunitas atau jama'ahnya. Pemahaman agama yang bersifat skriptualistik atau skriptualisme agama adalah sebuah pemahaman yang menempatkan agama hanya sebatas skriptual (teks-teks keagamaan). Pesan utama agama hanya dilihat dari perspektif teks-teks yang ada didalamnya. Pemahaman ini memaknai agama hanya pada apa yang tertulis dan tercantum dalam teks-teks keagamaan dan menolak untuk pengkritisan terhadap teks tersebut guna untuk menemukan makna substansi dari sebuah teks. Artinya segala hal yang tidak tercantum dan tidak disebutkan dalam teks-teks keagamaan akan ditolak (Effendy, 2011: xx).

Dari pemahaman ajaran yang bersifat tekstual kemudian memunculkan gerakan-gerakan fundamentalistik. Mereka kebanyakan adalah ahli matematika dan ilmu-ilmu eksakta lainnya yang bekerja secara empirik. Karena kurangnya waktu untuk mempelajari agama Islam secara mendalam mereka mencari jalan pintas dengan kembali kepada sumber-sumber tekstual Islam seperti al-quran dan hadits tanpa mempelajari berbagai penafsiran dan pendapat hukum yang sudah berjalan berabad-abad (Wahid, 2006: 348).

## 2. Formalisme Agama

Formalisme agama yang dimaksud penulis adalah upaya untuk menjadikan ajaran agama Islam sebagai aturan hukum dalam masyarakat. Penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan contoh dari formalisme agama. Pemahaman agama yang hanya melalui teks tanpa memahami makna substansi dari ajaran agama inilah yang kemudian mengakibatkan beberapa kelompok dari umat Islam menginginkan penerapan syariat agama Islam diterapkan. Gusdur dalam berbagai tulisannya menolak tentang formalisme Islam yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesempurnaan sistem Islam sebagai agama tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang lembaga tertentu melainkan pada kemampuan akal manusia untuk melakukan perbandingan-perbandingan sendiri. Ajaran Islam tetap akan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan hukum dan dasar bagi interaksi antar manusia tanpa harus di legal formalkan menjadi aturan di masyarakat. Hal itu menurut Abdurrahman Wahid dapat dilakukan apabila ajaran agama Islam sudah dihayati oleh setiap pemeluknya dan diimplementasi dalam kehidupan.

Al-Quran sebagai sumber pengambilan pendapat formal bagi kaum muslimin perlu dikaji dan ditinjau asumsi-asumsi dasarnya berdasarkan

kebutuhan setelah dihadapkan kepada kenyataan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Banyak dari ajaran Islam yang bersumber dari teks-teks yang masih butuh penafsiran. Ayat tersebut memiliki multi tafsir yang kemudian harus diinterpretasikan sesuai kebutuhan dan kondisi yang sedang dihadapi. Al-Quran membicarakan perbuatan amal shaleh dalam konteks sosio-ekonomi, namun tidak menetapkan sebuah lembaga yang permanen dan tidak bisa diubah (Ali, 2009: 37).

### 3. Radikalisme Agama

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme agama berarti kelompok yang menginginkan perubahan struktur sosial masyarakat yang berlandaskan agama tetapi menggunakan cara kekerasan. Dari hal ini kemudian muncul gerakan teroris yang berkedok atau membawa-bawa Islam sebagai landasan gerakannya. Menurut Gusdur, terorisme berkedok Islam muncul karena sikap mementingkan lembaga di atas kultur. Golongan yang mementingkan lembaga adalah menginginkan Islam menjadi sebuah institusi yang memiliki nama, kekuatan dan peran dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang mementingkan kultur akan memasukan ajaran Islam dengan pendekatan budaya dan bahkan masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari masyarakat yang menjalankan ajaran agama Islam (Wahid, 2006: 31).

Kaum muslimin yang menginginkan Islam sebagai intitusi adalah mereka yang mengidealisir Islam sebagai alternatif satu-satunya terhadap segala macam isme dan ideologi. Postulat-postulat formal Islam diajukan sebagai jawaban terhadap kemelut kehidupan masa modern. Mereka menutup diri rapat-rapat dari penyusupan gagasan yang dapat merusak kemurniannya. Tanpa disadari mental seperti itu menunjukkan kelemahan kaum Islam yang tidak mampu melestarikan keberadaan dirinya dalam keterbukaan (Wahid, 2016: 114-115).

Radikalisme atau penggunaan cara kekerasan dalam pengimplementasian ajaran agama Islam atau mempertahankan agama islam dari gagasan luar tentunya tidak sesuai dengan agama Islam yang mengajarkan kedamaian. Tindakan terorisme akan berakibat pada buruknya citra Islam di mata pemeluk agama lain. Radikalisme ataupun terorisme juga sudah menyalahi tentang penjaminan lima hak dalam universalisme Islam dan juga mengkhianati tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Agama yang disampaikan dengan

cara yang santun dan orang-orang masuk kedalamnya karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan dengan kelembutan dirusak dengan cara kekerasan.

Islam di Indonesia tidak mempunyai akar radikal. Munculnya radikalisme dan terorisme merupakan hasil adopsi kultur keagamaan yang datang dari luar. Semangat untuk menjalankan dan menerapkan ajaran Islam yang tanpa disertai pemahaman substansi tentang Islam menjadi salah satu penyebab terjadinya radikalisme berlandaskan agama. Mereka memahami masuk Islam secara *kaffah* adalah dengan cara harus menjadi bagian syariat hukum bagi dasar hukum negara. Menurut gerakan ini sistem yang terbangun bukan atas nama hukum Islam adalah sistem yang kafir. Oleh karena itu dalam gerakannya mereka memusuhi barat dan juga berimbas memusuhi sesama warga yang menerapkan dan mengadopsi sistem yang digunakan oleh barat. Kejayaan masa lalu Islam menjadi inspirasi untuk menjankan gerakannya saat ini sehingga memunculkan wacana memurnikan ajaran agama yang tidak tercampur dengan paham dan sistem dari luar (Siroj, 2015: 6).

Pemahaman tentang Islam yang memiliki dasar hukum dari al-quran dan Hadits serta menginginkan pemurnian ajaran Islam dapat dikategorikan sebagai neo-fundamentalisme. Neo-fundamentalisme yang berkembang di berbagai negara sebenarnya bukanlah memberikan alternatif atau tawaran yang baik bagi masa depan Islam itu sendiri. Sebab mendorong ke arah pemiskinan intelektual karena pandangan-pandangan literal dan tekstual yang tidak memberikan apresiasi terhadap kekayaan khazanah keislaman klasik yang kaya dengan alternatif pemikiran. Kenyataan tentang pemiskinan intelektual menjadikan kaum muslimin mulai kehilangan warisan pemikiran masa lampau dan pada akhirnya mereka tidak memahami ajaran dan praktek beragama ulama-ulama terdahulu. Dapat disimpulkan neo-fundamentalisme tidak mengetahui atau tidak mau mencari tahu tentang ilmu-ilmu dari kejayaan Islam masa lampau. Jikapun mereka mencari tahu, mereka mencari yang kemudian dirasa cocok dengan perjuangan untuk memurnikan dan mengembalikan ajaran agama Islam kepada dasar awal yaitu al-quran dan Hadits.

Radikalisme berdasarkan agama kemudian menjadi penghambat implementasi dari pluralisme yang diajarkan oleh Gusdur. Ketika ditawarkan tentang pluralisme pun berasal dari al-quran dan dipraktikkan Nabi Muhammad semasa hidup dan juga ketika berdakwah, mereka skriptualisme tetap menolak dan tidak mau mengakui tentang pluralisme. Mereka beranggapan pluralisme adalah produk orang "Barat", produk kafir dan bukan dari Islam sehingga memandang pluralisme adalah paham yang salah. Pluralisme juga tidak

tercantum dalam teks al-quran maupun Hadits secara eksplisit sehingga untuk menerima hal kalangan skriptualis tidak dapat menerima ide tentang pluralisme.

## F. AKTUALISASI PLURALISME KH. ABDURRAHMAN WAHID

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Gusdur merupakan tokoh pelopor di Indonesia tentang pluralisme yang membela hak perempuan, kaum minoritas dan juga tokoh pembaharu yang tetap berlandaskan kepada ajaran agama Islam tradisional yang diajarkan pesantren. Gusdur memberikan contoh semasa hidupnya bagaimana untuk bersikap dewasa dalam menjalankan agamanya, berhubungan dengan sesama dan juga bernegara. Dalam beberapa tulisannya Gusdur mengajukan tawaran menjadikan Islam sebagai sistem kemasyarakatan. Yang dimaksud sistem kemasyarakatan (*social system*) bukanlah tentang struktur kehidupan yang bersifat organisatoris belaka melainkan pengaruh tata kehidupan masyarakat atas tingkah laku para warganya (Wahid, 2007: 196).

Kajian fiqih perlu diperluas sehingga mencakup pembahasan atas ketimpangan sosial yang ada dimasyarakat. Dengan demikian perumusan hukum Islam tidak hanya terhenti di wilayah ibadah formal melainkan perluasan ke wilayah sosial. Dengan cara ini Islam bisa berperan sebagai etika sosial. Dalam hal ini Gusdur menginginkan perluasan pemahaman tentang praktik ibadah. Bukan hanya dimensi hubungan dengan Allah (*habluminallah*) tetapi ibadah dipahami sebagai hubungan dengan manusia. Semisal puasa dan zakat fitrah memang diwajibkan atas setiap umat Islam tetapi dari puasa dan zakat fitrah terdapat dimensi kemanusiaan yaitu mengajarkan tentang kepedulian dengan sesama, sepenanggungan dan sepenenderitaan. Batas akhir dari zakat fitrah adalah sebelum hari idul fitri yang bertujuan agar setiap muslim pada hari raya memiliki makanan yang dimakan sebagai pengiring suka cita (Arif, 2006: 267).

Islam memiliki keunggulan di bidang budaya dari sudut pengelihat Islam sendiri, karena ada kaitannya dengan agama. Kita harus mengembangkan kedua sikap hidup yang berlainan. Disatu pihak kaum muslimin harus mengusahakan agar Islam tidak tertinggal secara teoritik. Tetapi kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Walaupun kita menggunakan kekerasan berlipat-lipat jika secara budaya kita tidak memiliki pendorong kearah kemajuan maka kaum muslimin akan tetap tertinggal dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Gusdur Islam dapat menjadi pemicu kemajuan dan kebudayaan. Bukan menjadikan Islam sebagi formalisme dalam masyarakat melainkan mentransformasikan

Islam sebagai budaya. Kemudian pada akhirnya nilai-nilai budaya inilah yang menjadi pemicu keinginan untuk melakukan perubahan. Masyarakat tidak selalu terpaku dengan formalisme Islam karena mereka sudah mengamalkan Islam melalui budaya dan beberapa dari mereka mungkin tidak menyadari sudah ber-Islam melalui budaya.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Gusdur selama menjadi presiden keempat Indonesia. Pertama adalah melakukan perubahan Irian Jaya menjadi Papua dan penyetujuan simbol bendera bintang kejora. Oleh karenanya Gusdur dianggap sebagai bapak Papua. Saat masih bernama Irian Jaya warga disana bisa dikatakan sebagai warga "kelas dua". Alasan pemberian izin bendera bintang kejora untuk berkibar di Papua karena Gusdur berpendapat bendera bintang kejora sebagai bendera kultural dan menganggap sebagai umbul-umbul. Dalam kebijakan semasa pemerintahan Gusdur tetap mengedepankan kemanusiaan dan penjaminan kebebasan hidup. Pemberian izin tersebut sebagai wujud menghargai sesama manusia dan sesama warga Indonesia sehingga tidak ada anggapan sebagai warga "kelas dua". Ketidakadilan itulah yang kemudian mengakibatkan beberapa kelompok dalam masyarakat menginginkan lepas dari pemerintahan Indonesia (lihat <https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-gus-dur-persilahkan-bendera-opm-berkibar-di-papua>).

Selanjutnya Gusdur juga memberikan pengakuan terhadap agama Kong Hu Cu dan perayaan Imlek yang identik dengan warga Tionghoa. Hal ini juga dilakukan Gusdur sebagai pembelaan terhadap golongan minoritas di Indonesia. Sekali lagi Gusdur meletakkan dasar kemanusiaan dalam pembelaannya. Beliau menghargai perbedaan dan tidak menjadikan alasan untuk tidak bisa bersatu dan hidup berdampingan dengan damai. Bagi beliau etnis Tionghoa dan juga budayanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Melalui etnis Tionghoa Islam bisa tersebar ke Nusantara bersama pedagang India. Terbukti dengan adanya keturunan Tionghoa yang masuk dalam jajaran Wali Songo. Imlek dan tradisi barongsai merupakan bagian dari kebudayaan yang jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi saran untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan seperti yang dilakukan oleh para Wali dalam menyebarkan Islam di Nusantara melalui wayang (lihat <http://rappler.com/nation/121365-torture-martial-law-marcos-regime>).

Dengan berbagai pembelaannya terhadap minoritas, kelompok yang terpinggirkan menjadikan Gusdur memiliki banyak panggilan seperti "Bapak Tionghoa", "Bapak Pluralisme", dan "Bapak Papua". Langkah yang dilakukan oleh beliau pun mencerminkan Islam yang bisa diterima semua golongan dan

manfaat dari ajaran Islam dapat dirasakan oleh semua orang bukan hanya kaum muslimin. Seperti halnya Nabi Muhammad yang kepribadiannya diakui kehebatannya oleh para musuh dan kawannya serta dihormati oleh seluruh umat Islam.

Tentunya pluralisme yang diajarkan Gusdur sangat relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Dengan serbuan berbagai pengaruh modernisasi dan banyaknya kelompok yang berpaham tekstual, Islam yang melebur dan menjelma menjadi kebudayaan dapat menjadi sebagai benteng terakhir degradasi moral dan juga kebudayaan. Dengan mulai hilangnya kebudayaan pribumi maka secara tidak langsung masyarakat Indonesia mulai kehilangan jati dirinya. Masyarakat yang sedari awal begitu menghormati berbagai perbedaan dan hidup berdampingan dengan komunitas yang berbeda-beda mulai mengalami perubahan. Terlebih juga dikalangan umat muslim yang menganggap kelompoknya yang paling benar akan sangat sulit untuk dapat menerima kebenaran dari kelompok yang lain.

## G. KESIMPULAN

*Pertama*, pluralisme yang dicontohkan semasa hidup Gusdur adalah pluralisme yang dalam pengamalannya mengambil dasar dari ajaran-ajaran Islam. Implementasi pluralisme perspektif Gusdur bukan pada ranah teologi melainkan pada sosial budaya. Sehingga pluralisme tidak sama dengan sinkretisme. Landasan yang dijadikan pluralisme adalah universalisme Islam yang menjamin lima aspek yaitu jaminan keselamatan hukum (*hifdzu an-nafs*), jaminan kebebasan beragama (*hifdzu ad-din*), jaminan keselamatan keturunan dan keluarga (*hifdzu an-nasl*), jaminan harta pribadi (*hifdzu al-mal*) dan jaminan terhadap profesi dan hak milik (*hifdzu al-aqli*). Pluralisme perspektif Gusdur juga dilandaskan pada pribumisasi Islam. Islam menjadi etika sosial dan nilai-nilai Islam bertransformasi kedalam bentuk kebudayaan setempat, ajaran Islam dapat diamankan masyarakat tanpa melalui paksaan.

*Kedua*, dalam perjalanan pluralisme Gusdur juga menemui beberapa problem yang menjadikan pluralisme tidak serta merta dapat diterima oleh semua umat Islam. Pendangkalan pemahaman agama menjadi awal problem pluralisme tidak diterima. Pemahaman agama yang skriptualisme dan mengambil keputusan hukum hanya bersifat tekstual menyebabkan substansi ajaran agama Islam yang merupakan agama perdamaian dan *rahmatan lil 'Alamin* menjadi terabaikan. Kemudian dari pemahaman yang mengalami pendangkalan, kaum skriptualis menginginkan ajaran agama Islam menjadi

formalisme dalam masyarakat. Dalam perjuangan untuk menegakan keinginannya umat Islam yang tekstualis menjadi frontal dan juga radikal. Hal itu semua dilakukan atas dasar menginginkan syariat Islam dijadikan institusi formal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akaf, Halid. 2011. *Quo Vadis Liberalisme Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ali, As'ad Said. 2013. *Konstruksi Pemikiran Gusdur*, dalam Pengantar ahli buku Syaiful Arif, *Humanisme Gusdur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barton, Greg. 2002. *Biografi Gusdur Biografi Gusdur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.
- Effendi, Bahtiar. 2011. *Islam Liberal dalam Arus Peradaban Global*, dalam Halid Akaf, *Quo Vadis Liberalisme Islam Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Hanafi, Hasan. etl. 2007. *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibad, M. N. 2010. *Leadership Secrets of Gusdur-Gus Miek*. Yogyakarta: LKiS.
- Maftuh, Agus. 2007. *Mazhab Islam Kosmopolitan Gusdur*, dalam Kata pengantar buku Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: Wahid Institute.
- Muhammad, Husein. 2015. *Gusdur yang Merdeka itu*, dalam Agus Irawan, *Peci Miring: Novel Biografi Gusdur*. Jakarta: Javanica.
- RI, Departemen Agama. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Al-Waah.
- Salim, Hairus Salim. 1999. *Gusdur dan Kenangan Cendekiawan Zaman Prisma*, dalam Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*. Yogyakarta: LKiS.
- Siroj, Said Aqil. 2015. *Mendahulukan Cinta Tanah Air* dalam Abdul Ubaid dan Muhammad Bakir, *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: Kompas.
- Tilaar, H.A.R Tilaar. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: Wahid Institute.
- Wahid, Abdurrahman. 2016. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: Saufa.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: Wahid Institute, 2007.
- Sumber Website

<http://www.gusdurian.net/id/9-Nilai-Utama-Gus-Dur/>

[http://kepuustakaan.presiden.pnri.go.id/family/?box=detail&id=16&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=&presiden\\_id=3&presiden](http://kepuustakaan.presiden.pnri.go.id/family/?box=detail&id=16&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=3&presiden)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Wahid\\_Hasjim](https://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjim)

<http://m.detik.com/news/berita/3104715/jk-gus-dur-adalah-panutan-pluralisme>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/12/Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekulerisme-Agama.pdf>.